

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

2020

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2020/ LD. NO. 5 TLD. NO. 107 LL BAG
HUKUM: 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - Dasar Pembentukan Perda: sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit, organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh Persetujuan Bersama.

- Dasar hukum pembentukan perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 meliputi: Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 September 2020.
- Penjelasan, 2 hlm.

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019
2020

PERDA NO. 2 TAHUN 2020 / LD. NO. 1 TLD. NO. 103 LL BAG
HUKUM: 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK : - Dasar Pembentukan Perda: Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Dasar hukum pembentukan perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:
- Ketentuan Umum;
- Laporan Keuangan;
- Lampiran-lampiran;
- Ketentuan penutup;

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Juli 2020.
- Penjelasan, 2 hlm.

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA UNTUK PENGEMBANGAN AIR MINUM DALAM KEMASAN

2020

PERDA NO. 3 TAHUN 2020/ LD. NO. 1 TLD. NO. 103 LL BAG
HUKUM: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA UNTUK PENGEMBANGAN AIR MINUM DALAM KEMASAN

- ABSTRAK** : - Dasar Pembentukan Perda: dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu menambah penyertaan modal pemerintah daerah, investasi pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sesuai dengan Laporan Analisis Kelayakan Investasi Nomor 33/KAP/RW/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 sangat diperlukan untuk pengembangan usaha air minum dalam kemasan.
- Dasar hukum pembentukan perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
 - Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut: Ketentuan Umum; Jumlah dan sumber; Penganggaran; Bentuk Penyertaan Modal; Penggunaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban; Ketentuan penutup;
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Agustus 2020.
- Penjelasan, 3 hlm.

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

2020

PERDA NO. 4 TAHUN 2020/ LD. NO. 1 TLD. NO. 103 LL BAG HUKUM: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

ABSTRAK : - Dasar Pembentukan Perda: meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum di Kota

- Surakarta, dipandang perlu memanfaatkan keahlian dan pembiayaan dari badan usaha melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan serta kesejahteraan masyarakat terkait dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta maka diperlukan adanya pengaturan;
- Dasar hukum pembentukan perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
 - Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum;
 - Ruang Lingkup;
 - Perencanaan;
 - Tahap Penyiapan;
 - Tahap Transaksi;
 - Ketentuan Peralihan;
 - Ketentuan Penutup;

CATATAN

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Agustus 2020.
- Penjelasan, 3 hlm.

